Dari Gurindam ke Tata Kelola

Cetak Biru Etika Kepemimpinan Raja Ali Haji

Menyintesis Moralitas Individu dan Keadilan Negara dalam Tradisi Melayu-Islam.

Dr. Hos Arie Sibarani

Sebuah Kajian Naratif Historis & Filosofis

Krisis Epikentrum Melayu Abad ke-19

Runtuhnya Mitos Feodal

Konflik legitimasi antara Melayu dan Bugis pasca mangkatnya Sultan Mahmud Syah (1699). Terjadinya pergeseran tatanan kekuasaan tradisional yang memicu instabilitas.



Penetrasi Barat & Hedonisme

Menguatnya pengaruh kolonial (Belanda/Inggris) dan gaya hidup hedonis dari pelabuhan baru Singapura (minuman keras, judi) yang merusak tatanan moral elite istana.

Di tengah ancaman keruntuhan identitas kultural dan politik ini, Raja Ali Haji hadir menawarkan jalan keluar: Reformasi Etika.

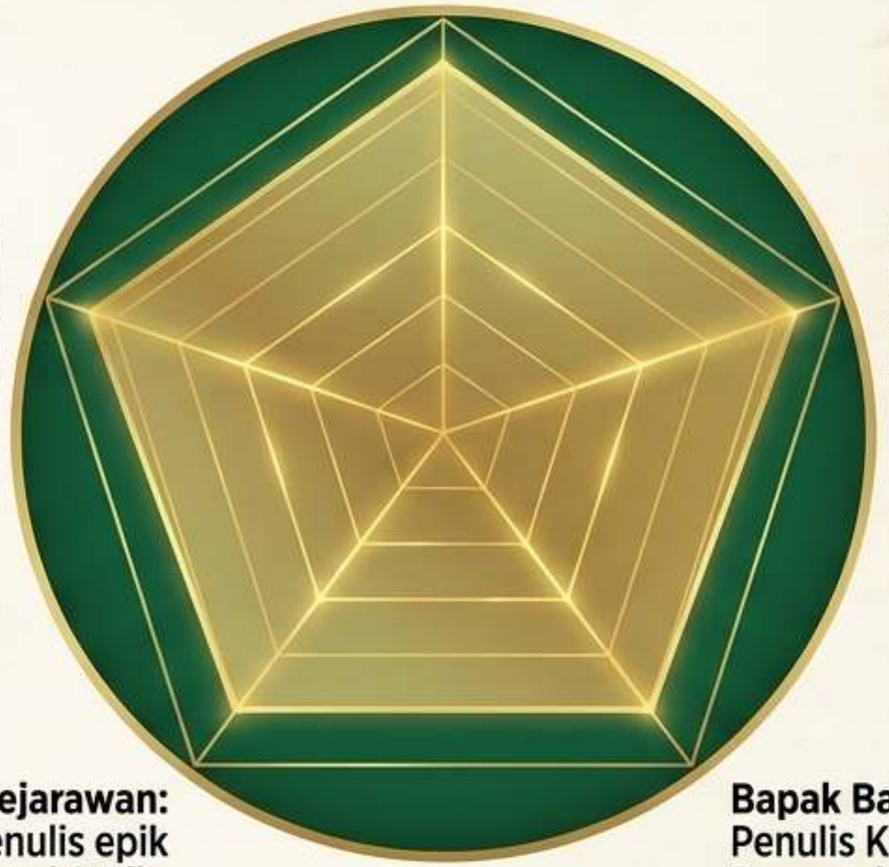
Sang Polimatik dari Penyengat (1808–1873)

Character Profile

Raja Ali Haji bukan sekadar penyair sastra. Ia adalah poros intelektual Kerajaan Riau-Lingga, penasihat utama para Yang Dipertuan Muda, dan pemegang otoritas Ahl al-haq wa al-'adl (Dewan Keadilan).

Ulama & Sufi:
Penganut Tarekat Naqsyabandiyah.

Sastrawan:
Penggubah Gurindam Dua Belas.



Ahli Tata Negara:
Melantik Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (1857).

Sejarawan:
Penulis epik *Tuhfat al-Nafis*.

Bapak Bahasa:
Penulis Kitab Pengetahuan Bahasa.

Jaringan Kosmopolitan & Rihlah Keilmuan

Pulau Penyengat (Riau)

Pelopor Haji Kerajaan (1828 M)

RAH dan ayahnya menjadi kerabat kerajaan Riau pertama yang menunaikan ibadah haji, membuka gerbang diplomasi intelektual.

Episentrum Haramain

Bermukim 2 tahun. Terhubung dengan jaringan ulama global (Syeikh Ismail, Syeikh Muhammad Shalih Az-Zawawi).

Sintesis Pengetahuan

Membawa pulang perpaduan ilmu falak, fikih politik Timur Tengah, dan tasawuf untuk direkayasa ulang menjadi cetak biru tata kelola Melayu.

Mekkah (Haramain)

Paradigma Utama: Syariat di Atas Takhta

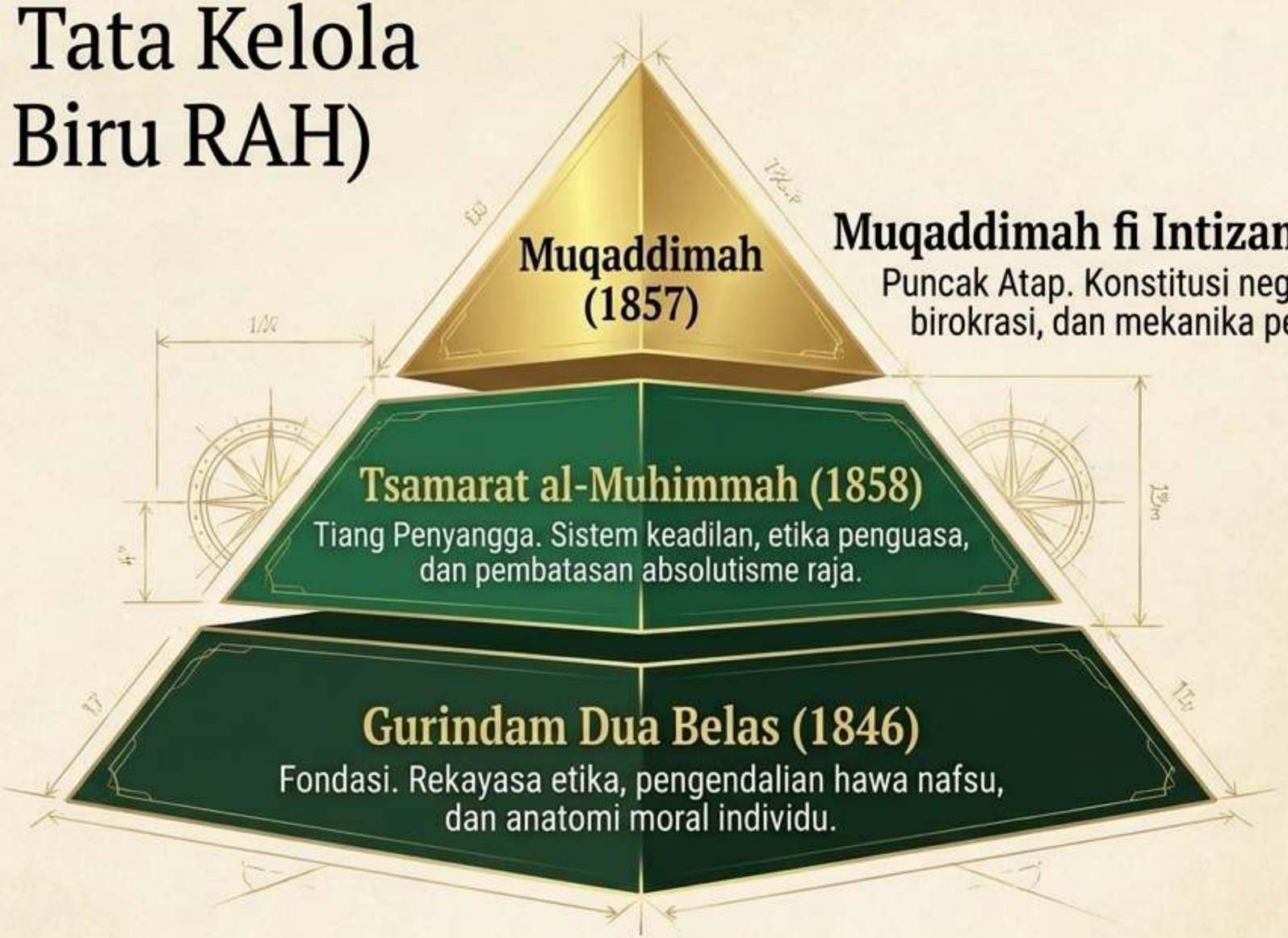
Kedaulatan Tertinggi (Syariat)
Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' adalah konstitusi absolut yang tidak dapat diganggu gugat.

Pemimpin (Raja/Sultan)
Bukan "Dewa" atau mitos yang tak tersentuh. Raja hanyalah "Wakil Umat" pemegang amanah yang tunduk pada Syariat.

Rakyat / Negara
Memiliki hak menegur penguasa (amar ma'ruf nahi munkar) jika raja bertindak zalim.

"Jangan sekali-kali mengikutkan undang-undang yang menyalahi syariat." – (*Tsamarat al-Muhimmah*)

Trilogi Tata Kelola (Cetak Biru RAH)



Muqaddimah fi Intizam (1857)

Puncak Atap. Konstitusi negara, etos kerja birokrasi, dan mekanika pemerintahan.

Gurindam 12: Kurikulum Etika Komprehensif

Ketuhanan
(Pasal 1-2)
Pengenalan Hakikat Diri & Tuhan. Menegakkan Rukun Islam & Iman sebagai tiang utama.



Pengendalian Fisik
(Pasal 3-4)
Penjagaan indera jasmani (mata, telinga, lidah, anggota gerak) dari maksiat dan penyakit hati.

Relasi Sosial
(Pasal 5-7, 10)
Panduan memilih sahabat, mendidik anak, menghormati orang tua, dan literasi pergaulan.

Kepemimpinan
(Pasal 11-12)
Etika memegang jabatan, menjauhi khianat, syarat mufakat raja dan menteri.

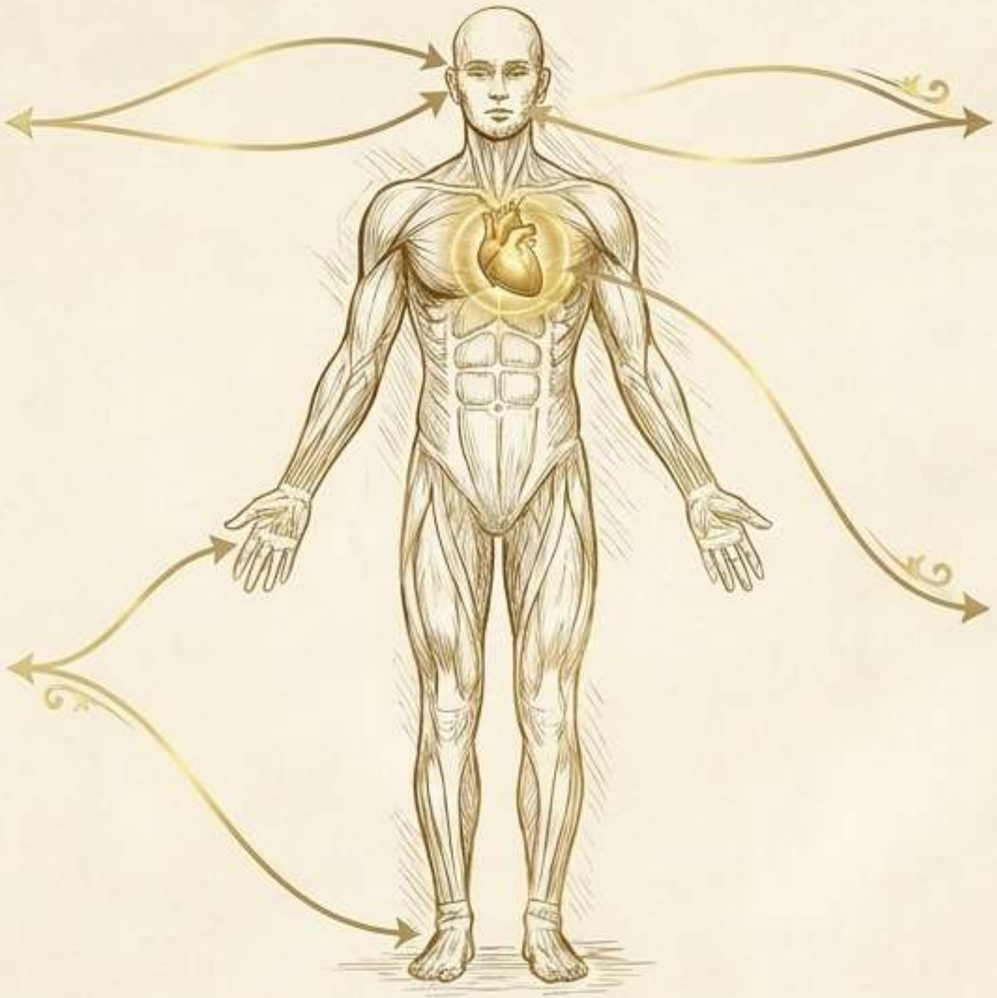
Anatomi Moral Manusia (Pasal 3 & 4)

Mata & Telinga

Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat tiadalah damping.

Lidah

Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. (Menahan dusta).



Tangan & Kaki

Menjaga tindakan fisik agar tidak merugikan orang lain.

Hati (Pusat Komando)

Hati kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun roboh. (Jika batin rusak, maka seluruh tatanan fisik dan sosial akan hancur).

Tsamarat al-Muhimmah: Mengendalikan Kekuasaan



Keadilan adalah Hasil, Bukan Sekadar Tujuan.

Menurut RAH, kesehatan fisik sebuah negara bergantung pada keadaan batin pemimpinnya. Keadilan hanya terwujud jika pemimpin mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah, bukan memaksakan hukum adat yang menyimpang. Pemimpin yang amoral kehilangan hak legitimasi politiknya.

Hak Penguasa
(Kekuasaan & Wibawa)

Kewajiban Syariat
(Keadilan & Hukum)

4 Virus Penjajah Kepemimpinan

Takabbur (Angkuh)

Gejala: Merasa berkuasa mutlak, menolak kritik.

Dampak: Melahirkan tirani.

Ghadab (Pemarah)

Gejala: Emosi tidak stabil (‘Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala’).

Dampak: Kebijakan impulsif dan kejam.

Hasad (Dengki)

Gejala: Iri terhadap pencapaian bawahan/rakyat.

Dampak: Menghancurkan kolaborasi dan meritokrasi.

Bakhil (Kikir)

Gejala: Penumpukan kekayaan pribadi, abai pada rakyat.

Dampak: Korupsi dan kemiskinan sistemik.

Muqaddimah fi Intizam: Etos Birokrasi Negara



Asas Kecermatan

Setiap keputusan administratif dan hukum harus diambil dengan ketelitian tingkat tinggi, berbasis bukti, bukan asumsi.

Persamaan di Hadapan Hukum

Sistem peradilan (Ahl al-haq wa al-'adl) berlaku untuk semua, membatalkan konsep tulah (kekebalan gaib raja).

Akuntabilitas Etis

Pejabat negara (Qadi, Menteri) wajib bermusyawarah dengan ulama karena jangkauan ilmu dan rujukan hukum masa lalu.

Mekanika Musyawarah (Sistem Filter Syura)

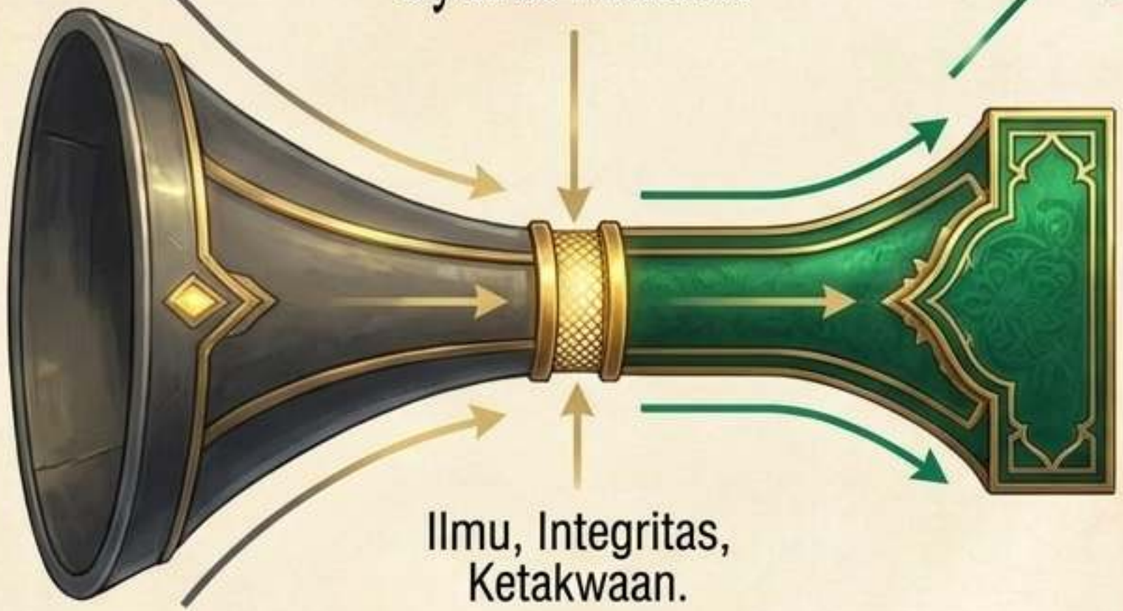
Ditolak / Filter Out

RAH secara tegas melarang pelibatan:

Orang jahil, penakut, riya, pendengki, bakhil, dan pengikut hawa nafsu.

‘Barangkali didapat kecederaan pada musyawarah.’

Syarat Mutlak



Ilmu, Integritas, Ketakwaan.

Diterima / Ruang Keputusan

Para Ulama, Ahli Ilmu, dan Pemimpin Adil.

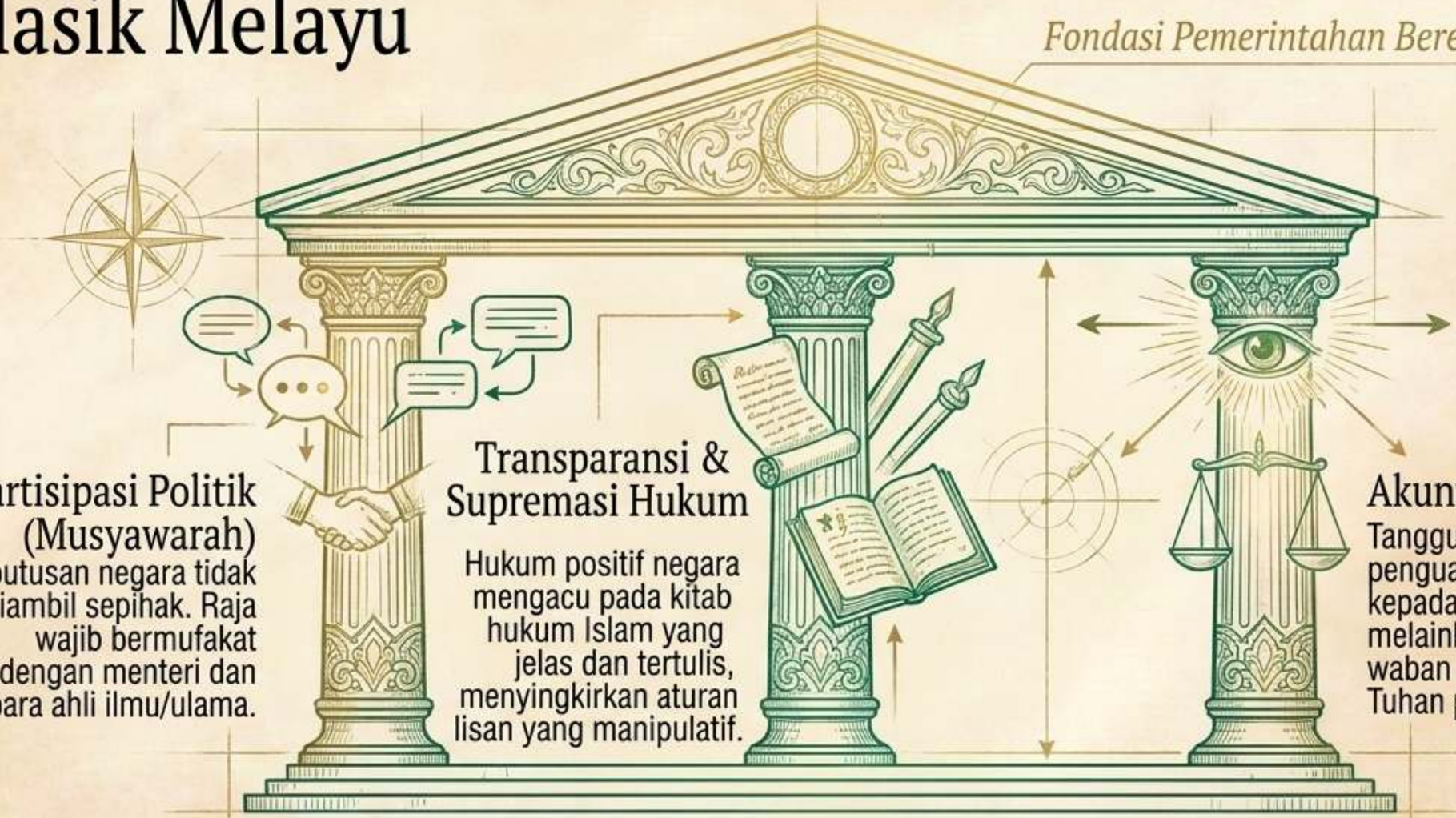
Musyawarah adalah fondasi rasionalitas pemerintahan, mencegah lahirnya kebijakan feodal yang sewenang-wenang.

Pergeseran Paradigma Ketatanegaraan Melayu

	Kepemimpinan Feodal Klasik	Kepemimpinan Etis RAH
Posisi Raja	Berdaulat mutlak, semi-dewa (mitos Zulkarnain).	Wakil umat, manusia biasa pemegang amanah Allah.
Sumber Hukum	Kehendak Raja dan Adat (Kepatuhan buta).	Kedaulatan absolut pada Syariat (Al-Qur'an, Hadits, Ijma').
Sanksi Pelanggaran	Rakyat dihukum tulah (kutukan gaib) jika derhaka. Raja kebal hukum.	Hukum rasional dan setara. Raja zalim kehilangan legitimasi dan berhak diturunkan.

Warisan '*Good Governance*' Klasik Melayu

Fondasi Pemerintahan Beretika



Partisipasi Politik (Musyawarah)

Keputusan negara tidak diambil sepihak. Raja wajib bermufakat dengan menteri dan para ahli ilmu/ulama.

Transparansi & Supremasi Hukum

Hukum positif negara mengacu pada kitab hukum Islam yang jelas dan tertulis, menyingkirkan aturan lisan yang manipulatif.

Akuntabilitas Moral

Tanggung jawab penguasa bukan sekadar kepada institusi negara, melainkan pertanggungja-waban mutlak di hadapan Tuhan pada hari Akhirat.

Kerajaan di Dalam Tubuh

"Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun roboh."

– Raja Ali Haji, Gurindam Dua Belas (Pasal 4)

Reformasi birokrasi dan negara termegah sekalipun tidak akan pernah terwujud tanpa terlebih dahulu menata etika dan menaklukkan hawa nafsu di dalam diri para pemimpinnya. Tata negara dimulai dari tata hati.